

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha	11
1. Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	11
2. Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Australia.....	12
B. Tinjauan Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha	13
1. Pendekatan <i>Per se Illegal</i>	13
2. Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	14
C. Tinjauan Umum tentang Persekongkolan Tender di Indonesia.....	15
1. Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia	15
2. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender di Indonesia	18
3. Lembaga Otoritas Penegakan Hukum Persekongkolan Tender di Indonesia.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Persekongkolan Tender di Australia.....	24
1. Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Australia	24
2. Lembaga Otoritas Penegakan Hukum Persekongkolan Tender di Australia.....	26
E. Tinjauan Umum tentang Sanksi terhadap Pelaku Persekongkolan Tender	28

1. Sanksi terhadap Pelaku Persekongkolan Tender di Indonesia	28
2. Sanksi terhadap Pelaku Persekongkolan Tender Menurut di Australia.	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Bahan Penelitian.....	34
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Perbandingan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Persekongkolan Tender antara Indonesia dan Australia dalam Kasus Putusan KPPU No. 15-KPPU-L-2023 dan ACCC v First Class Slate Roofing	38
1. Penegakan Hukum Persekongkolan Tender di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	38
2. Penegakan Hukum Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan (Putusan KPPU No. 15-KPPU-L-2023) Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	47
3. Penegakan Hukum Persekongkolan Tender di Australia oleh Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)	59
4. Penegakan Hukum Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Atap (Putusan ACCC v First Class Slate Roofing) Menurut Hukum Persaingan Usaha Australia	69
5. Perbandingan Penegakan Hukum Persekongkolan Tender antara Indonesia dan Australia dalam Kasus <i>a quo</i>	76
B. Pelajaran dan Kebermanfaatan yang Dapat Diambil dari Perbandingan Penegakan Hukum Persekongkolan Tender antara Indonesia dengan Indonesia kepada Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	83
1. Formulasi Ulang Sanksi dan Penerapan Program <i>Leniency</i> bagi Pelaku Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha.....	83
2. Optimalisasi Program Kepatuhan dan Pemberian Rekomendasi dalam Putusan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95